

PERANAN WIRASWASTA DALAM PENGELOLAAN AGRIBISNIS

William SOERYADJAYA

PENDAHULUAN

Pada akhir abad ke-18, Thomas Malthus memperkirakan bahwa tidak dapat dihindarkan penduduk dunia akan bertambah dengan cepat dan berada di atas kemampuan tanah dalam memenuhi kebutuhan pangan manusia. Keadaan seperti ini pada gilirannya akan menimbulkan kelaparan massal dan perang yang dahsyat. Walaupun sejarah tidak menuruti perkiraan Malthus, tetapi bahaya yang diperkirakannya masih terus membayangi masyarakat dunia dewasa ini dan juga dalam masa yang akan datang.

Beberapa lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa di dunia sekarang ini terdapat sebanyak 1.000 juta manusia yang mengalami kekurangan makanan. Dengan perkataan lain, seperempat dari penduduk dunia dilanda kelaparan. Bila mereka ini menerima atau memperoleh makanan yang cukup, maka pada tingkat produksi sekarang, semua persediaan pangan yang ada akan habis.

Menurut perhitungan, bila produksi bahan makanan dan hasil-hasil pertanian terus bertambah pada tingkat yang sama dengan tingkat yang dicapai dalam dua dekade yang lalu - yaitu kira-kira 2,7% setiap tahun maka kebanyakan negara berkembang akan mengalami masalah pangan yang sangat serius. Pemenuhan kebutuhan pangan bila diukur dalam kalori akan berkurang dari tingkat yang dicapai sekarang yaitu 92% menjadi 80% pada akhir abad ke-20.¹

Dari pengalaman-pengalaman sejak Indonesia merdeka, kita mengetahui betapa pelik dan susahnyanya masalah pangan di Indonesia. Masalah yang kita

¹ Lihat, D.C. Kimmel, "Food and Agriculture: A United Nation View", *Economic Impact*, 1980/4, hal. 8-13

hadapi tidak saja hanya menyangkut peningkatan produksi, tetapi juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan distribusi, pemasaran dan hal-hal yang mengatur kedudukan para produsen yang sebagian terdiri dari petani.

Untuk menghadapi dasawarsa yang akan datang adalah merupakan suatu hal yang sangat penting melakukan tindakan-tindakan yang terarah mengenai masalah pangan atau pertanian. Pada tingkat pertama Indonesia perlu meningkatkan produksi. Peningkatan produksi dimaksudkan agar Indonesia dapat berswasembada dalam bidang pangan sehingga dengan demikian ketergantungan kepada dunia luar yang dalam dasawarsa 1980-an ini semakin diwarnai oleh ketidakpastian dapat diperkecil. Pada tingkat kedua kita mengharapkan Indonesia dapat menjadi negara pengekspor pangan sehingga secara tidak langsung kita dapat membantu masyarakat dunia yang menghadapi masalah kesulitan pangan dan secara langsung tindakan seperti ini akan menghasilkan devisa yang sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan.

Bila diamati, kegiatan pertanian yang dilakukan di Indonesia pada umumnya masih sederhana dan masih dapat serta perlu dikembangkan secara lebih baik dengan menerapkan konsep agribisnis. Penerapan konsep agribisnis pada dasarnya dapat menghasilkan kenaikan produksi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dan seiring dengan pelaksanaannya ia dapat bergandengan dengan peningkatan kemampuan para pelaku yang terlibat di dalamnya di samping keuntungan-keuntungan besar lainnya baik yang bersifat ekonomis maupun yang nonekonomis.

Dalam kesempatan ini saya akan mencoba menguraikan atau mengemukakan pemikiran saya tentang agribisnis dalam hubungannya dengan peranan para wiraswasta. Hal ini saya anggap penting karena dengan demikian dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas yang diperlukan sebagai dasar bagi penentuan langkah-langkah yang perlu diambil dalam menanggulangi masalah-masalah yang kita hadapi dalam pembangunan dan dalam usaha menyukseskan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Sehingga tujuan pembangunan nasional yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dapat dicapai dalam irama yang lebih cepat.

I. KONSEP AGRIBISNIS DAN KEMUNGKINAN PENERAPANNYA

Istilah agribisnis pada pertama kali diperkenalkan oleh J. Davis dan K. Goldberg dalam buku yang berjudul "A Concept of Agribusiness" pada

tahun 1957. Menurut kedua penulis ini agribisnis didefinisikan sebagai berikut:¹

"Agribusiness is the sum total of all operations involved in the manufacturing and distribution of farm supplies, production activities on the farm; and the storage, processing and distribution of farm commodities and items made from them."

Dari definisi ini menjadi jelas bahwa pengertian agribisnis sangat luas dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan beraneka ragam serta mempunyai kaitan dengan kegiatan-kegiatan di luar sektor pertanian. Kegiatan agribisnis bukan hanya menyangkut produksi tetapi juga meliputi usaha pengolahan, penyaluran dan penyimpanan. Usaha agribisnis merupakan usaha yang dilakukan secara terintegrasi dan masing-masing kegiatan yang dilakukan saling menunjang mulai dari penyediaan prasarana dan masukan-masukan yang dibutuhkan untuk produksi seperti pupuk, pengairan sampai kepada penyampaian hasil produksi tersebut kepada para konsumen.

Di negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat agribisnis berkembang dengan pesat sejak permulaan tahun 1950. Dengan usaha seperti ini Amerika Serikat dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya serta dapat menjadi negara pengekspor utama pangan di dunia.

Sampai saat ini Indonesia belum pernah mengalami krisis pangan seperti yang dialami oleh beberapa negara-negara di Afrika. Tetapi ini tidak berarti bahwa Indonesia bebas dari ancaman bahaya krisis pangan. Sampai tahun ini Indonesia masih mengimpor pangan dari luar negeri dalam jumlah dan nilai yang tidak kecil walaupun negara kita mempunyai potensi untuk menghasilkannya sendiri.

Dari data-data statistik yang tersedia, diketahui bahwa untuk tahun 1979 Indonesia harus mengeluarkan devisa sebanyak US\$ 759,7 juta untuk mengimpor pangan (beras, gula, minyak kelapa, kacang tanah dan jagung). Memang sejak tahun 1969 sampai tahun 1979 terdapat peningkatan produksi beberapa komoditi pangan di Indonesia. Tetapi dalam kurun waktu sepuluh tahun kita hanya mampu meningkatkan misalnya produksi jagung sebesar 44,1% atau kira-kira 3,72% setiap tahun, ubi kayu 21% atau kira-kira 2,01% setiap tahun, kacang tanah 56% atau kira-kira 4,58% setiap tahun dan kacang kedele 59% atau kira-kira 5,65% setiap tahun.²

Gambaran atau keadaan seperti ini dilihat dari segi ekonomi, politik dan sosial tidak dan/atau kurang menguntungkan pihak Indonesia. Karena untuk

1 J.D. Drilon, Jr., *Agribusiness Management, Resource Materials*, Vol. I, Tokyo 1971, hal. 15

2 Lihat, Biro Pusat Statistik, *Indikator Ekonomi*, Juli 1980

memenuhi kebutuhan pangan (kebutuhan pokok masyarakatnya), Indonesia masih tergantung kepada dunia luar. Dalam keadaan seperti ini maka Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dari luar (misalnya gejolak harga di pasaran internasional dan gejolak politik) yang dalam gilirannya dapat mengganggu usaha pembangunan atau ketahanan nasional Indonesia.

Di lain pihak, terdapat beberapa faktor penting lainnya yang menyebabkan Indonesia perlu meningkatkan dan menggalakkan usaha pertanian atau meningkatkan produksi pertanian. Faktor-faktor tersebut diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Sampai sekarang potensi yang kita miliki (seperti tanah, tenaga kerja, keadaan alam, modal) belum dimanfaatkan secara penuh. Di satu daerah tertentu, misalnya di Pulau Jawa untuk tahun 1973 sebanyak 57,4% usaha tani hanya mengusahakan tanah yang luasnya kurang dari 0,5 ha.¹ Sedang di luar Pulau Jawa masih terdapat tanah yang sangat luas yang belum dimanfaatkan dengan baik.
2. Subsidi pangan yang diberikan oleh pemerintah dalam beberapa tahun belakangan ini berkembang dengan cepat. Bila dalam tahun anggaran 1978/1979 jumlah subsidi pangan baru mencapai Rp 43,489 milyar maka dalam tahun anggaran 1981/1982 diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 309,7 milyar atau menjadi 2,23% dari seluruh APBN yang berarti peningkatan sebesar 82,5% dari anggaran tahun sebelumnya. Subsidi pangan ini akan semakin membengkak dalam tahun-tahun mendatang bila Indonesia terus mengimpor bahan pangan atau tidak menghasilkannya di dalam negeri. Dengan membesarnya subsidi semacam ini dapat dipastikan dana yang seyogyanya dipergunakan untuk usaha pembangunan di sektor lain menjadi berkurang.
3. Untuk beberapa komoditi hasil pertanian biaya produksi adalah lebih rendah di Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dengan perkataan lain Indonesia mempunyai "comparative advantage" yang lebih baik bila dibandingkan negara-negara lainnya. Ini berarti menghasilkan komoditi-komoditi tersebut di Indonesia dapat menguntungkan.
4. Menurut perkiraan FAO, untuk menghindari masalah pangan dunia diperlukan tingkat pertumbuhan hasil-hasil sektor pertanian sesedikitnya sebesar 4% setiap tahun. Pertumbuhan dalam tingkat yang lebih tinggi dari angka rata-rata tersebut sangat diharapkan khususnya dari negara-negara yang mempunyai sumber energi. Harapan yang demikian semakin besar karena negara-negara maju seperti Amerika Serikat sudah mulai mengalihkan atau mengurangi kegiatan-kegiatannya dalam sektor pertanian. Kenaikan harga bahan bakar yang merupakan komponen biaya merupa-

1 Lihat, Biro Pusat Statistik, Sensus Pertanian 1973

kan penyebab utama dari kecenderungan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan Indonesia akan merupakan salah satu negara yang potensial untuk menghasilkan atau memproduksi pangan dalam tingkat pertumbuhan yang lebih besar.

Dalam pemerintahan Orde Baru usaha menggalakkan sektor pertanian selalu dilakukan oleh pemerintah. Sejalan dengan usaha tersebut pemerintah telah mengambil beberapa langkah tertentu yang diantaranya dapat disebutkan:

1. Menyediakan dan menyempurnakan prasarana dan sarana seperti pengairan, pembangunan pelabuhan, pembuatan dan perbaikan jalan.
2. Memberi bantuan keuangan berupa kredit-kredit dan alat-alat pertanian.
3. Memberi penyuluhan dan penerangan cara bercocok tanam, pemasaran hasil produksi, misalnya melalui usaha koperasi.
4. Melakukan dan merangsang dilakukannya penyelidikan untuk menemukan bibit-bibit unggul dan menyalurkannya kepada para petani.
5. Mendirikan proyek "Nucleus Estate Smallholder Development Scheme" (NES). Proyek ini didirikan berdasarkan sistem bapak angkat, di mana petani kuat (perkebunan besar) membantu petani lemah yang berusaha di sekitar wilayah perkebunan tersebut. Dengan kerja sama seperti ini diharapkan petani kecil dapat memperoleh bantuan atau fasilitas dari perkebunan besar dan di lain pihak akan ada jaminan tersedianya bahan baku bagi perkebunan tersebut.
6. Menggalakkan investasi dalam agribisnis dengan membuka kesempatan bagi penanaman modal di bidang tanaman padi, jagung/sorghum, kacang-kacangan, ubi-ubian, sayur-mayur, tanaman hias dan memberi keringanan dalam bidang perpajakan (tax holiday).

Tindakan yang disebut terakhir ini dapat dikatakan merupakan tindakan yang tepat baik dilihat untuk tujuan jangka pendek (misalnya dalam rangka usaha swasembada pangan) dan tujuan jangka panjang (sebagai negara pengekspor bahan pangan atau hasil produksi yang diolah dari padanya).

Dengan kebijaksanaan seperti ini secara sadar pemerintah mengajak agar para pengusaha (wirawasta) untuk memainkan peranan secara lebih aktif dalam usaha pembangunan khususnya dalam sektor pertanian. Kebijakan ini sudah barang tentu perlu mendapat tanggapan yang baik dari para wira-swasta. Tetapi sejalan dengan itu kiranya perlu untuk dikemukakan beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian agar sasaran dapat dicapai secara efisien dan efektif, walaupun secara ekonomi usaha seperti ini dapat dilaksanakan secara menguntungkan.

II. PERANAN WIRASWASTA

Hasil-hasil penelitian telah membuktikan bahwa faktor-faktor penyebab dari pertumbuhan ekonomi yang cepat ternyata, bahwa faktor manusia sebagai wiraswasta sangat menonjol. Maka itu para perumus kebijaksanaan dan pembuat keputusan dari sesuatu negara selalu berusaha menciptakan para wiraswasta atau mengembangkan orang-orang agar dapat menjalankan fungsi dari wiraswasta. Tindakan seperti ini didasarkan atas pemikiran bahwa wiraswasta dapat lahir dan berkembang sebagai hasil dari usaha pemerintah, misalnya melalui pendidikan. Tetapi tidak jarang wiraswasta tersebut lahir dan berkembang sebagai hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh wiraswasta itu sendiri. Untuk dapat melihat gambarannya secara lebih jelas kiranya perlu dikemukakan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh wiraswasta yaitu:¹

1. Memimpin usaha, baik secara teknis dan/atau ekonomis, dengan berbagai aspek fungsional sebagai berikut:
 - a. memiliki modal secara penuh (owner) atau secara bagian (co-owner);
 - b. mengurus dalam kapasitas sebagai penanggung jawab atau sebagai manajer;
 - c. menerima dan menghadapi tantangan ketidakpastian dan karenanya menanggung resiko ekonomi yang timbul yang mungkin sulit diukur secara kuantitatif dan kualitatif;
 - d. memelopori usaha baru, menerapkan kombinasi-kombinasi baru, yang berarti wiraswasta bertindak sebagai pionir, organisator, koordinator, atau tokoh yang dinamis.
2. Mencari keuntungan bisnis.
3. Membawa usaha ke arah kemampuan, perluasan, perkembangan, melalui jalan kepemimpinan ekonomi, demi kontinuitas usaha dan/atau kekuasaan, kehormatan, kebebasan, kenaikan prestise.

Yang disebut terakhir ini terang merupakan perbuatan yang didorong tidak hanya oleh motif ekonomi tetapi juga oleh pertimbangan-pertimbangan psikologis, sosiologis dan bahkan politis. Fungsi apa yang dilakukan oleh seorang wiraswasta serta bagaimana dia melakukan itu akan mencerminkan tipe kepribadian seseorang wiraswasta dan inilah yang dapat membedakan seorang wiraswasta dengan wiraswasta lainnya.

Secara sederhana wiraswasta dapat dikatakan adalah orang yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam mana dia juga merupakan bagian daripadanya untuk tujuan tertentu melalui aktivitas ekonomi baik

1 Bandingkan dengan, Daoed Joesoef, "Pendidikan dan Pengembangan Kewiraswastaan", dalam Kumpulan Kertas-kertas Kerja Sistem Pendidikan dan Pengembangan Kewiraswastaan di Indonesia, hal. 17-96.

secara langsung maupun secara tidak langsung. Dihadapkan dengan kegiatan ekonomi yang mungkin dikelola wiraswasta mungkin menghadapi masalah yang pada dasarnya bersumber dari keterbatasan alat-alat produksi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh wiraswasta tersebut. Sudah lama keterbatasan seperti ini diketahui bahkan keterbatasan tersebutlah yang menyebabkan para penganut aliran kapitalisme murni menjadi mengubah pandangannya. Mereka menjadi menyadari bahwa bila semua kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta maka yang menjadi akibatnya adalah banyak sekali kebutuhan masyarakat tidak akan terpenuhi terlebih bila dilihat dari segi kemampuan perekonomian suatu negara dan dimensi waktu. Para penganut kapitalisme murni mengetahui tanpa keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi maka misalnya prasarana seperti jalan-jalan, pelabuhan-pelabuhan dan bahkan mungkin pendidikan sekalipun tidak akan diproduksi walaupun mungkin bila dihitung berdasarkan perhitungan ekonomi kegiatan tersebut akan dapat menguntungkan. Banyak contoh yang dapat dikemukakan tetapi kiranya menjadi jelas bahwa keterbatasan dalam bidang permodalan dari para wiraswasta dapat merupakan faktor yang dominan dalam menentukan berhasil tidaknya sesuatu usaha.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, tentang arah pembangunan jangka panjang diantaranya disebutkan: "Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha; sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan nyata."¹

Dari ketentuan ini menjadi jelas bahwa untuk dapat melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien maka pemerintah dan dunia usaha harus berusaha secara tunjang-menunjang. Dan dengan dasar pemikiran seperti inilah dianggap perlu para wiraswasta memberi tanggapan yang positif melalui kegiatan yang nyata terhadap gagasan pemerintah untuk menggalakkan agribisnis.

Beberapa masalah pokok yang kita hadapi dalam usaha pembangunan adalah masalah kesempatan kerja, pengangguran dan urbanisasi. Ketiga masalah ini saling berkaitan satu sama lain. Bagi Indonesia permasalahannya sangat pelik karena dengan pembangunan yang dilaksanakan, perluasan kesempatan kerja tidak berbanding lurus dengan pengurangan pengangguran. Keadaan seperti ini terjadi tidak hanya karena terjadinya penambahan

1 Lihat, Garis-garis Besar Haluan Negara, Ketetapan MPR-RI No. IV/MPR/1978

angkatan kerja tetapi juga disebabkan mobilitas angkatan kerja yang sangat lambat. Kebanyakan dari mereka yang menganggur atau setengah menganggur adalah mereka yang sebelumnya bergerak di sektor pertanian. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa menurut sensus pertanian, untuk tahun 1973, 57,4% usaha tani di Pulau Jawa hanya memiliki tanah kurang dari 0,5 ha. Keadaannya mungkin saja pada saat ini belum bertambah baik karena beberapa faktor tertentu seperti sistem warisan yang berlaku di Pulau Jawa. Tetapi adalah jelas bahwa jumlah ini tidak memadai bagi para petani. Mereka ini mencoba mencari pekerjaan di luar sektor pertanian. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak memiliki kemampuan atau keahlian seperti yang dibutuhkan oleh sektor di luar sektor pertanian (misalnya perindustrian, bangunan dan jasa). Sedang di lain pihak mereka tidak mempunyai modal yang memadai untuk melakukan aktivitas ekonomi lainnya, misalnya perdagangan. Dengan demikian walaupun terbuka kesempatan kerja di luar sektor pertanian, kesempatan kerja tersebut tidak segera dapat diisi.

Di samping masalah yang disebutkan di atas, Indonesia juga mengalami masalah kepadatan penduduk, khususnya kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Pemerintah telah berusaha mengatasi masalah ini dengan melakukan transmigrasi. Tidak dapat disangkal usaha ini sampai tingkat tertentu telah memberi hasil. Tetapi tidak berlebihan bila dikatakan usaha ini perlu digalakkan. Dalam keadaan sekarang diharapkan bahwa agribisnis (wiraswasta) dapat berperan untuk menyukseskan usaha ini yaitu dengan cara memanfaatkan tenaga-tenaga kerja yang berasal dari Pulau Jawa yang pada umumnya telah mempunyai ketrampilan dalam melaksanakan usaha pertanian. Sehingga dapat dikatakan dengan agribisnis dapat dicapai beberapa sasaran sekaligus.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa peranan wiraswasta adalah sangat besar bila mereka melakukan aktivitas seperti agribisnis. Tetapi semuanya itu akan dapat mencapai sasaran secara tepat bila kerja sama antara pemerintah dan para wiraswasta dapat berjalan dengan baik dan saling menunjang.

III. USAHA MENYUKSESKAN AGRIBISNIS

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, agribisnis merupakan kegiatan ekonomi yang terintegrasi mulai dari pengadaan masukan-masukan (input) yang dibutuhkan dalam proses produksi sampai kepada hasil produksi tersebut dapat mencapai para konsumen. Kegiatan seperti ini dalam dirinya menuntut persyaratan permodalan yang cukup besar dan menuntut kemam-

puan organisatoris dan administratif yang teratur, keuletan dalam menjalankan usaha, serta menghadapi resiko yang besar seperti wabah hama, banjir besar, musim yang tidak menguntungkan. Pemerintah melalui kebijaksananya mengajak para wiraswasta untuk melakukan agribisnis. Tetapi agar usaha ini dapat mencapai sasarannya seperti yang diharapkan masih diperlukan tindakan atau kebijaksanaan lainnya dan diantaranya meliputi:

1. Di dalam peraturan mengenai penanaman modal di bidang tanaman pangan ditentukan bahwa pembukaan areal baru minimal 300 ha untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) kecuali untuk bidang penanaman sayur-sayuran. Membuka dan mengusahakan areal yang luas seperti ini membutuhkan biaya yang cukup besar belum lagi termasuk prasarana dan sarana (seperti jalan-jalan, jembatan, alat-alat pengangkutan yang dapat menghubungkan tempat dilakukannya produksi dan konsumen). Para wiraswasta pada umumnya belum mampu memikul keseluruhan biaya tersebut sehingga kerja sama dengan pemerintah sangat diharapkan. Pemerintah sangat diharapkan berperan dalam penyediaan prasarana dan sarana sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan selaras. Dengan demikian dalam gilirannya pemerintah dengan cepat akan memperoleh dana yang ditanamkannya melalui pajak atas keuntungan atau pendapatan perusahaan.
2. Penentuan lokasi dalam agribisnis merupakan faktor penting. Menurut peraturan yang menyangkut hal ini, pada umumnya kegiatan agribisnis diarahkan agar mengambil lokasi di luar Pulau Jawa. Sejalan dengan usaha tersebut pemerintah perlu memberikan pengarahannya yang lebih terperinci mengenai lokasi-lokasi tertentu dengan menghubungkannya dengan rencana pembangunan wilayah. Dengan cara seperti ini dapat diharapkan bahwa dana yang diperuntukkan untuk pembangunan akan dapat dipergunakan secara lebih efektif dan di lain pihak para wiraswasta akan menjadi lebih terangsang melakukan investasi karena adanya kepastian mengenai prospek kegiatan yang akan dilakukan.
3. Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa biaya untuk menghasilkan beberapa komoditi pangan tertentu adalah lebih rendah di Indonesia bila dibandingkan dengan di luar negeri. Tetapi kalau diteliti lebih lanjut, "comparative advantage" yang lebih baik ini tidak atau kurang memberi rangsangan bagi para wiraswasta untuk menanamkan modalnya. Hal ini terjadi karena untuk beberapa komoditi tertentu (misalnya beras), pemerintah menentukan harga dan/atau tidak memperkenankan ekspor atau walaupun diperkenankan, dikenakan bea atau pajak yang cukup tinggi. Memang pemerintah menyadari hal ini dan ini terbukti dari tindakan pemerintah yang setiap tahun menaikkan harga pembeliannya atau berusaha menekan pajak ekspor dan memperbaiki prosedurnya. Kebijakan seperti ini perlu ditingkatkan. Memang harus diakui bahwa dengan tin-

dakan seperti ini mungkin akan timbul keresahan sebagian anggota masyarakat, khususnya masyarakat konsumen seperti yang terjadi pada tahun-tahun yang lalu. Tetapi dalam masa sekarang dan untuk masa yang akan datang keadaannya sudah sedikit berlainan. Bobot pengeluaran untuk pangan sedikit demi sedikit akan berkurang seiring dengan pertambahan pendapatan masyarakat. Dan yang lebih penting, dengan tindakan semacam ini anggota masyarakat yang tingkat pendapatannya masih rendah (masyarakat yang bergerak di sektor pertanian dan yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia) dapat tertolong.

4. Dalam pembukaan areal baru tentu timbul masalah yang berhubungan dengan pemilikan dan pemindah-milikan tanah. Persoalannya mungkin akan menjadi rumit dan pihak swasta tidak akan mampu menyelesaikannya tanpa campur tangan pemerintah. Perhatian terhadap masalah ini perlu diberikan agar tidak timbul keresahan di masyarakat dan keengganan bagi para wiraswasta untuk menanamkan modalnya atau berusaha.
5. Kegiatan agribisnis di suatu lokasi tertentu dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi yang dimaksudkan. Hal ini mungkin terjadi bila aktivitas yang dilakukan oleh pendatang-pendatang baru ini dalam wujudnya kompetitif dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di sekelilingnya. Kemungkinan menjadi kompetitif akan besar karena sifat tanah yang berada di satu lokasi tertentu biasanya homogen. Untuk menghindari agar jangan sampai terjadi keresahan maka para pendatang baru perlu mempersiapkan diri dengan mengambil tindakan-tindakan yang tepat misalnya dengan melibatkan mereka dalam usaha tersebut. Seiring dengan ini pemerintah juga perlu membantu dalam bentuk pengarahan, bimbingan ataupun penerangan.
6. Dalam uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa salah satu manfaat dari agribisnis adalah bahwa usaha tersebut dapat menyukseskan usaha transmigrasi dan tujuan pokok dari transmigrasi itu sendiri. Adalah jelas bahwa tujuan dari transmigrasi tidak hanya untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk. Tetapi yang paling penting adalah memperbaiki taraf hidup masyarakat khususnya mereka yang ditransmigrasikan. Bila agribisnis yang berlokasi di luar Pulau Jawa berhasil dengan baik, dengan sendirinya akan mengundang transmigrasi spontan. Tetapi memperhitungkan dana yang kita punyai dan peruntukkan untuk pembangunan masih sangat terbatas, adalah merupakan tindakan yang tepat jika usaha transmigrasi yang diprakarsai oleh pemerintah dikaitkan dengan agribisnis. Dengan cara seperti ini diharapkan dana (baik dari pihak swasta maupun dari pihak pemerintah) dapat dipergunakan secara lebih efektif dan efisien. Untuk ini sudah barang tentu dibutuhkan kerja sama yang baik antara pihak pemerintah dengan para penanam modal.
7. Tujuan jangka panjang pembangunan sektor pertanian di Indonesia pada dasarnya adalah agar Indonesia dapat berdiri sendiri atau menghasilkan

sendiri kebutuhan pangan masyarakatnya dan di samping itu agar Indonesia dapat mengeksport hasil-hasil pertanian atau benda-benda yang dihasilkan daripadanya ke luar negeri. Bila ini dapat diterima maka sudah selayaknya jika mulai dari sekarang dilakukan persiapan-persiapan yang lebih intensif ke arah tujuan tersebut. Persiapan-persiapan yang dimaksudkan dapat berupa misalnya, penelitian-penelitian tentang tanaman yang mempunyai harapan yang baik untuk diperdagangkan di pasar internasional; penyempurnaan dalam bidang yang menyangkut prosedur agar komoditi yang dihasilkan dapat sampai ke tempat tujuan secara tepat. Yang disebut terakhir ini merupakan faktor yang penting, karena daya tahan hasil produksi pertanian pada umumnya relatif singkat.

8. Bila diamati secara seksama, terdapat beberapa jenis komoditi pangan yang dapat dihasilkan dengan mudah dan sangat berguna, tetapi tidak dapat diperdagangkan (*untradeable*). Hal ini terjadi karena masyarakat tidak dan/atau kurang mengetahui manfaatnya atau bahkan karena merasa turun prestisenya bila mengkonsumsi komoditi tersebut. Padahal ditinjau dari segi kebutuhan (misalnya kebutuhan akan protein) dan ditinjau dari segi kemampuan masyarakat (tingkat pendapatannya) membeli dan mengkonsumsi komoditi yang dimaksudkan adalah sangat tepat. Hal seperti ini tentu perlu mendapat perhatian dan usaha-usaha untuk penanggulangannya perlu dilakukan secara terarah. Inisiatif pada dasarnya tidak hanya harus dari para wiraswasta tetapi mungkin akan lebih efektif bila datangnya dari pihak pemerintah, media massa dan masyarakat yang mengetahuinya. Tindakan seperti ini merupakan tindakan yang dapat mencapai lebih dari satu sasaran sekaligus. Masyarakat konsumen akan tertolong karena mereka akan dapat memenuhi kebutuhannya secara lebih baik dan masyarakat produsen akan terbantu karena mereka menjadi dapat memanfaatkan sumber-sumber yang ada secara lebih efisien.
9. Ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat cepat dan dalam banyak hal kemajuan tersebut sangat membantu kita dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Kemampuan kita membuat hujan buatan sangat bermanfaat bagi usaha pengembangan pertanian. Kemampuan kita menemukan bibit-bibit unggul, cara pengairan baru, cara bercocok tanam sangat membantu dalam usaha meningkatkan produksi. Tetapi sehubungan dengan agribisnis terdapat masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh ilmu pengetahuan itu sendiri atau walaupun dapat dipecahkan, penanggulangannya terlambat. Bagi para wiraswasta ini dianggap sebagai resiko. Besar kecilnya resiko tersebut akan menentukan apakah wiraswasta bersedia memikulnya atau mengambil langkah untuk menghindarkannya. Memang salah satu aspek fungsional dari wiraswasta adalah menerima tantangan ketidakpastian. Tetapi itu tidak berarti wiraswasta tidak berusaha untuk memperkirakannya. Maka itu sejalan dengan usaha menyukkseskan agribisnis hal ini perlu dipikirkan. Sebagai akibat ketidakpastian para

wiraswasta mungkin akan menderita kerugian yang dalam perputarannya menyebabkan mereka meminta bantuan dari pemerintah. Bantuan tersebut bentuknya bermacam-macam dan diantaranya adalah bantuan kredit, keringanan pajak. Dengan demikian dapat dikatakan untuk hal-hal seperti ini perlu dilakukan persiapan-persiapan sehingga bila itu terjadi, tindakan yang akan diambil sudah dapat ditentukan secara tepat dan terarah.

Kiranya masih banyak faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian dalam usaha menyukkseskan agribisnis. Dari uraian di atas juga menjadi jelas bahwa usaha agribisnis bukanlah pekerjaan yang mudah tetapi merupakan pekerjaan yang menuntut pengelolaan yang baik.

PENUTUP

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara disebutkan bahwa prioritas pembangunan dalam Pelita III dititikberatkan pada perkembangan bidang pertanian menuju swasembada pangan. Dan di samping itu dinyatakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta sangat diperlukan.

Pemerintah dalam usahanya untuk mengembangkan sektor pertanian mengajak para wiraswasta untuk mengambil bagian secara aktif melalui kegiatan agribisnis. Ajakan ini perlu mendapat tanggapan yang positif dari para wiraswasta karena berbagai macam keuntungan yang mungkin dicapai daripadanya. Khusus bagi para wiraswasta, kegiatan tersebut dapat menguntungkan secara ekonomi dan di samping itu terdapat keuntungan lain yang lebih luas sifat dan jangkauannya. Dengan kegiatan seperti itu para wiraswasta akan dapat membantu pemerintah dalam usahanya melaksanakan dan menyukkseskan pembangunan. Kegiatan agribisnis dalam perputarannya dapat membantu dalam mengatasi kepadatan penduduk, urbanisasi dan segala akibat yang timbul daripadanya, pengangguran dan di lain pihak dapat dipergunakan sebagai peralatan untuk membantu usaha transmigrasi, penghematan dan penghasilan devisa atau meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya mereka yang sampai saat ini berpenghasilan rendah.

Tetapi semua sasaran-sasaran yang diinginkan akan tercapai bila tercipta kerja sama yang baik antara pemerintah dengan para wiraswasta. Kerja sama dalam hal ini menjadi semakin menonjol karena sasaran-sasaran yang ingin dicapai dengan agribisnis tersebut bermacam-macam dan di lain pihak terdapat keterbatasan-keterbatasan tertentu dari para wiraswasta. Para wiraswasta dapat berperan dengan baik dalam agribisnis dan hasilnya akan men-

jadi semakin nyata dan besar bila dalam pelaksanaannya pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang tepat dan terarah.

Pada dasarnya, agribisnis bukan pekerjaan yang mudah dan sederhana. Dalam dirinya usaha seperti ini menuntut persyaratan-persyaratan tertentu, seperti modal yang besar, organisasi yang kuat, administrasi yang teratur dan keuletan dalam menjalankan usaha.

Dalam agribisnis terdapat satu faktor yang lebih menonjol bila dibandingkan dengan kegiatan usaha lainnya yaitu resiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari ketidakmampuan dari ilmu pengetahuan untuk mengatasinya, atau karena ketidakmampuan manusia untuk menghindarkannya. Resiko yang timbul dari ketidakpastian ini tentunya merupakan tantangan dan rangsangan bagi kita untuk berusaha. Dengan adanya ketidakpastian ini secara terus-menerus, hidup kita harus menjadi lebih bersemangat dan bergairah serta selalu menjadi dekat dengan kekuatan di luar kita yaitu Pencipta alam semesta, dan Pencipta kita.

Akhirnya saya perlu mengemukakan tanpa ketidakpastian para wiraswasta akan kehilangan salah satu fungsi pokoknya dan bila segala sesuatu telah dapat diperhitungkan dan dipastikan para wiraswasta menjadi kurang berarti. Maka itu kiranya perlu dicamkan dalam hati, manusia harus dan perlu berusaha tetapi juga harus menerima bahwa Tuhan-lah yang menentukan segala sesuatunya.

